



LKIP 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI
JAKARTA TAHUN 2022**

LKIP 2022
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah S.W.T. karena kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta ini merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, Sasaran Operasional, Program dan Indikator Kerja Utama serta Anggaran Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan ini dibuat dan kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi.

Jakarta, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta



Elisabeth Ratu Rante Allo
NIP. 197009241998032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I	
PENDAHULUAN	6
1.1. LATAR BELAKANG	7
1.2. TUJUAN DAN MANFAAT.....	7
1.3. KEDUDUKAN, TUGAS & FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA.....	8
1.4. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA.....	10
1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	11
1.6. SISTEMATIKA LKIP 2022.....	17
BAB II	
RENCANA STRATEGIS	19
2.1. VISI DAN MISI	19
2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2022.....	22
2.3. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD.....	23
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	64
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	64
1. TARGET PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI	64
2. REALISASI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	66
3. PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL	86
4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	87
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	90
1. REALISASI ANGGARAN PER SKPD/UKPD DINAS PPKUKM TAHN 2022 ..	90
2. REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2022	91
BAB IV	
PENUTUP	95

IKHTISAR EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi harus dilakukan di tubuh Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Reformasi Birokrasi harus disertai dengan aksi yang nyata sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab; dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance, lahirlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menghadapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta ke depan tentunya menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat. Hal ini karena Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sentralisasi dan desentralisasi bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Itulah sebabnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visinya sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya secara optimal, demokratis, bertanggungjawab, transparan dan responsive sesuai amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dalam upaya mengantisipasi berbagai tantangan dan hambatan terutama tantangan dan hambatan di masa pandemi, maupun perkembangan yang semakin sulit dan kompleks saat ini, kelembagaan baru Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang telah dibebankan disajikan beberapa hal berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah dipersyaratkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022.
4. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran baik Sasaran Strategis, Sasaran Khusus maupun Sasaran Operasional dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik, walaupun ada 1 (satu) KSD (Kegiatan Strategis Daerah) yang capaiannya tidak mencapai 100% yaitu KSD No 20 (KSD Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu) yang capaiannya sebesar 99,74% serta penyelesaian pengaduan masyarakat yang capaiannya sebesar 99,86%
5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan yang juga merupakan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dapat terealisasi dengan sangat baik, dimana jumlah pertumbuhan kewirausahaan yang terdaftar dalam sistem Jakprenur berjumlah 34.920 wirausaha dengan rincian 6.984 IKM dan 27.936 UKM
6. Penyerapan APBDP 2022 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM mencapai 95,00% dan secara kualitas pelaksanaan anggaran yang dihitung dari 3 (tiga) komponen yaitu penyerapan anggaran, efisiensi dan output, terealisasi sebesar

92,63% dari target 91%.

7. Selama 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategis Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta yaitu dari Tahun 2018 – 2022, dapat terlihat peningkatan realisasi Indikator Kinerja Program walaupun masih ada 2 (dua) Indikator Kinerja Program yang tidak mencapai target yaitu:
- Indikator Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang tidak tercapai targetnya di Tahun 2020, 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan adanya pandemic covid sehingga terjadi rasionalisasi anggaran dan pembatasan pergerakan (PPKM) serta banyaknya pabrik pabrik yang pindah keluar Provinsi DKI sehingga obyek UTTP untuk pelaksanaan Tera dan Tera ulang berkurang.
 - Indikator Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya yang tidak tercapai targetnya di Tahun 2020 dan 2021. Hal ini dikarenakan adanya pandemic covid yang mengakibatkan rasionalisasi anggaran untuk pembelian test kit sebagai alat uji yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk IKM bebas bahan berbahaya

Demikian Ikhtisar eksekutif ini dibuat untuk menjelaskan secara umum hasil LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dan untuk lebih jelasnya dapat dibaca dari hasil LKIP selengkapnya.

Jakarta, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta



Elisabeth Ratu Rante Allo
NIP 197009241998032004

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun Laporan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, UKM Provinsi DKI Jakarta. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, UKM Provinsi DKI Jakarta disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan:

Esensi dari sistem LKIP bagi Dinas adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian pada instansi pemerintah. Sistem pengendalian ini merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis dinas dan kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja

Pada setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan / sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kerja Dinas. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada stakeholders dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua tujuan utama, yaitu :

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan dan permasalahan tentang kinerja penyelenggaraan

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, UKM dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2022 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

Manfaat:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, UKM Provinsi DKI Jakarta memberikan manfaat bagi pihak internal dan eksternal. Bagi keperluan internal organisasi, LKIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja (performance gap) yang ditemukan, manajemen Dinas dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas atas capaian kinerja yang berhasil atau belum berhasil diperoleh selama Tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan/sasaran telah dicapai selama Tahun 2022.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS & FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

Kedudukan:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah dan dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda. Kedudukan tersebut menunjukkan adanya aspek strategis dalam tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai bagian integral dari Organisasi Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya akan mendukung Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan peran strategisnya, yaitu menjadikan Pemerintah Daerah yang akuntabel

Tugas:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas PPKUKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan

pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- e. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- h. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi dan sarana distribusi perdagangan;
- i. pelaksanaan penjaminan keteersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- l. pelaksanaan promosi perdagangan dan pencitraan produk ekspor;
- m. pelaksanaan fasilitasi ekspor impor;
- n. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal;
- o. pelaksanaan perlindungan konsumen;
- p. pelaksanaan pengujian, inspeksi dan sertifikasi mutu produk;
- q. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- r. pelaksanaan kemetrologian berupa tera, tern ulang dan pengawasan;
- s. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
- t. pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- u. pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- v. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- w. pelaksanaan pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual;

- x. pelaksanaan pendampingan sertifikasi produk-produk industri;
- y. pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- z. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- aa. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- bb. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, susunan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum
 - 2. Subbagian Kepegawaian
 - 3. Subbagian Program dan Pelaporan
 - 4. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Industri
 - 2. Seksi Industri Kecil dan Menengah
 - 3. Seksi Industri Kreatif dan Digital.
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 - 3. Seksi Pemasaran.
- e. Bidang Koperasi, terdiri dan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 2. Seksi Kelembagaan Koperasi
 - 3. Seksi Pembiayaan Koperasi
- f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah

3. Seksi Usaha Informal
- g. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan Perindustrian dan Kemetrolcgian
 2. Seksi Pengawasan Perdagangan
 3. Seksi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- h. Suku Dinas Kota dan Suku Dinas Kabupaten
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

A. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta memiliki tujuan sebagai berikut:

“Meningkatkan Peran Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian DKI Jakarta”

B. Sasaran

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta.
2. Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing
3. Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

C. Strategi

Adapun strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai sasaran di atas, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan serta pengembangan koperasi.
2. Mengoptimalkan upaya pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, serta peningkatan produktivitas usaha kewirausahaan.

3. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam dan luar negeri.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan melalui penguatan implementasi kebijakan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP)

Sasaran dan strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Pada tiap-tiap sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi visi, misi dan sasaran organisasi

Penyusunan program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tersebut mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Program Urusan Koperasi dan UKM serta Program Urusan Perdagangan di Tahun 2018 memiliki sedikit perbedaan dengan Tahun 2019-2022. Hal ini dikarenakan belum tersusunnya RPJMD 2018-2022 pada saat penyusunan Program Tahun 2018, sehingga penyusunan Program Tahun 2018 mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Kebijakan inilah yang mengakibatkan adanya perbedaan program dan indikator program yang digunakan pada Tahun 2018 dengan Tahun 2019-2022, setelah RPJMD 2018-2022 tersusun.

Namun, dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan untuk Program dan indikatornya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Perubahan nama Program tersebut baru diterapkan di dalam Perencanaan Tahun 2021 seiring dengan adanya perubahan RPJMD yang diikuti dengan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM

Adapun Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM sejak Tahun 2018 – 2021 adalah sebagai berikut :

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah serta Perdagangan Tahun 2018:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah Volume Usaha Koperasi
2. Program Pembinaan dan Pengembangan UKM.
 - Indikator Program:
 - a. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - Indikator Program:
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - Indikator Program:
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
5. Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia)
 - b. Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang
 - d. Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
7. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah serta Perdagangan Tahun 2019:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi
2. Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM.
 - Indikator Program:
 - a. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
5. Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrolagian yang diawasi
 - b. Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang
 - d. Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
7. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2020:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi
2. Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM.
 - Indikator Program:
 - a. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
5. Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan.
 - Indikator Program:

- a. Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrollogian yang diawasi
 - b. Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang
 - d. Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
6. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
 7. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
 8. Program pembinaan dan Pengembangan Industri
 - Indikator Program
 - a. Jumlah wirausaha industri baru
 - b. Persentase jumlah IKM yang berkualitas
 - c. Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif
 9. Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
 - Indikator Program
 - a. Persentase produk industri dengan standar SNI
 - b. Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya
 10. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kantor
 11. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian
 - Indikator Program
 - a. Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2021 :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah wirausaha industri baru
 - b. Persentase jumlah IKM yang berkualitas
 - c. Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif
 - d. Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
 - Indikator Program:
 - a. Persentase produk industri dengan standar SNI

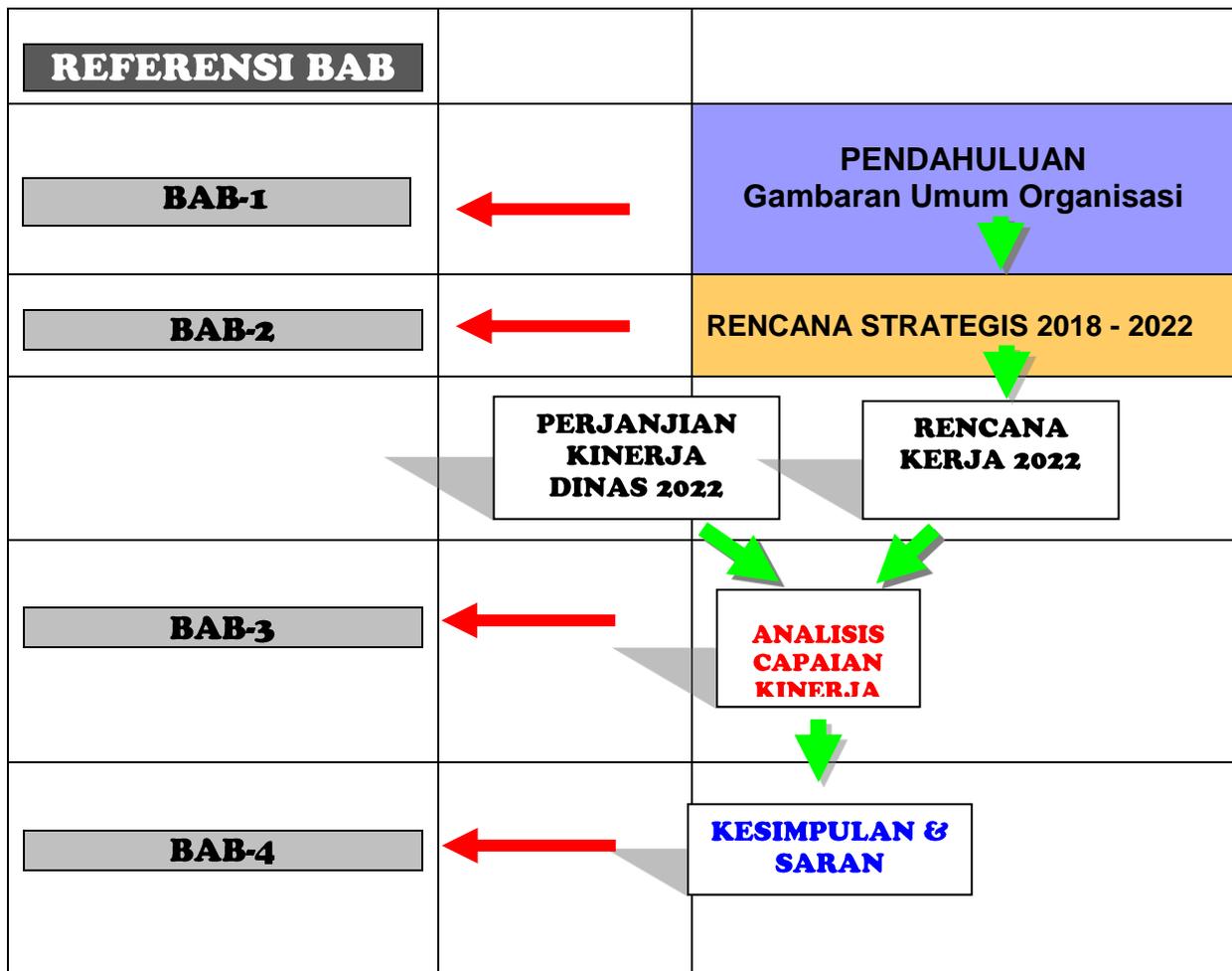
3. Program Pengembangan Ekspor
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrollogian yang diawasi
 - b. Jumlah pasar yang menggunakan alat Kemetrollogian yang diawasi (kode B)
 - c. Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti
 - d. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Dalam Negeri
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi
7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian
8. Program Pengembangan UMKM
 - Indikator Program:
 - a. Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis
9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - Indikator Program:
 - a. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Indikator Program:
 - b. Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1.6. SISTEMATIKA LKIP 2022

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2022, capaian kinerja (performance results) dengan Rencana Kinerja (performance plan) merupakan ukuran keberhasilan tahunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan identifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa tahun-tahun mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat diilustrasikan sebagaimana uraian dibawah ini.

Sistematika LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dalam bagan berikut:



BAB II

RENCANA STRATEGIS

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa tujuan strategis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 2018 - 2022 selaras dengan visi misi Gubernur melalui implementasi sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pada setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan / sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

2.1. VISI dan MISI

A. Visi

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra, visi yang ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta selaras dengan visi Gubernur yaitu : "Jakarta kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua".

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta: meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu

kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

Maju: memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban: keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

Dalam upaya visinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta telah memperhatikan keselarasannya dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengingat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu juga memperhatikan kondisi lingkungan kerja Dinas yang berada di Ibukota negara dengan permasalahan nasional yang lebih kompleks.

Pernyataan visi yang dikemukakan di atas merupakan idealisme yang harus menjadi komitmen segenap pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkannya. Dengan pernyataan visi ini diharapkan seluruh pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui keberadaan, peran, dan program instansi ini secara tepat.

B. Misi

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan misinya selaras misi Gubernur no 2 (dua) dan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

“Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta, dan mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) pada setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja 2022 ini juga merupakan komitmen dari segenap karyawan dan pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Uraian mengenai Rencana Kinerja 2022 yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN AKTIVITAS SUB KEGIATAN DINAS PPKUKM TAHUN 2022

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Dinas - Sekretariat	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Belanja Hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta	1.376.506.248	1.308.110.413
Dinas - Sekretariat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Belanja Hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta	2.755.360.000	2.745.360.000

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Dinas - Bidang Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Partisipasi Pada Pameran di Luar Negeri	6.999.288.274	4.161.423.274
Dinas - Bidang Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Partisipasi pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI)	516.506.500	516.506.500
Dinas - Bidang UKM	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Partisipasi Pameran Dalam Kota	8.067.558.479	4.567.630.815
Dinas - Bidang Koperasi	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Partisipasi Pameran Harkopnas Expo Tahun 2022	226.927.899	0
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembahasan Isu-Isu Strategis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.499.964.142	4.499.964.142
Dinas - Bidang Pengawasan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Pembinaan Gerakan Konsumen Cerdas	198.473.578	198.473.578
Dinas - Bidang Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pembuatan Akta Pendirian Koperasi	241.760.000	241.760.000
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Pendingin	92.183.014	92.183.014
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas PPKUKM	227.112.855	227.112.855

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
		Daerah				
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	25.361.292	23.308.230
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	257.933.751	257.933.751
Dinas - Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan industri kreatif Fashion & Kerajinan	3.374.917.250	2.633.039.100
Dinas - Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Industri Kreatif Video, Animasi & Games	2.093.700.000	1.993.800.000
Dinas - Bidang Pengawasan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pengadaan Alat Test Uji Cepat	153.710.920	146.397.108
Dinas - Bidang Pengawasan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Pengawasan dan pengendalian industri	56.620.000	56.620.000
Dinas - Bidang Pengawasan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan Kemetrologian Alat UTTT (Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	92.437.750	80.876.500
Dinas - Bidang Pengawasan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi Mutu Produk	Pengawasan Produk SNI Wajib	130.970.096	118.111.536

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Dinas - Bidang Pengawasan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengawasan UMKM	14.450.000	14.450.000
Dinas - Bidang UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelolaan Jakarta Creative Hub	7.210.812.543	2.154.353.701
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	73.833.375	73.833.375
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	197.655.502	197.655.502
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.380.475	42.937.125
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	272.290.000	272.290.000
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM Peralatan Kerja	28.206.000	2.306.000
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	152.907.496.757	115.372.760.000
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	10.518.000	10.518.000

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO khusus	29.369.100	29.369.100
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	1.986.446.280	2.232.722.590
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	1.872.935.064	2.105.138.442
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Mekanikal Elektrikal	56.755.608	63.792.074
Dinas - Sekretariat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penyediaan Jasa Sektor Perindustrian	367.257.264	382.752.444
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	2.739.192.560	1.808.630.000
Dinas - Bidang UKM	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Penyediaan Kios Jakpreneur	0	4.439.716.950
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	116.351.620	122.207.800
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.747.192.748	1.747.192.748
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Keamanan Kantor	53.714.485	53.714.485
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	76.957.683	76.957.683
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal	1.280.477	1.280.477

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Dinas - Sekretariat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	112.384.800	112.384.800
Dinas - Bidang UKM	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM	288.185.480	288.185.480
Dinas - Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Promosi Produk Kreatif (pemasaran digital marketing)	1.303.532.963	934.227.916
Dinas - Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Workshop E Smart	232.520.000	232.520.000
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Pusat	1.099.240.812	306.889.280
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Pusat	2.743.309.504	2.808.269.422
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Pusat (Lokasi Sementara)	14.762.726.433	5.509.410.486

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
		Kepentingan	Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Pusat	563.157.392	529.924.032
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penyediaan Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Pusat	16.481.432	16.481.432
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Pusat	4.700.202.016	4.700.202.016
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Pusat	9.053.538.304	8.612.253.304
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Pusat	7.636.397.728	7.721.041.792

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penyediaan Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Pusat	15.511.936	15.511.936
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Cukai	51.229.985	31.379.853
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.910.800	1.910.800
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.538.711	36.538.711
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.436.190	26.436.190
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	43.583.400	43.583.400
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.677.680	8.677.680
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	133.994.001	133.994.001
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan sewa mesin foto copy	37.461.600	37.461.600
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Keamanan Kantor	10.587.500	10.587.500
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	1.991.088.960	2.232.722.590
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.249.374	56.249.374
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	15.865.630	15.865.630

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
	Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah				
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor/Lapangan	42.174.946	42.174.946
Sudin PPKUKM Jakarta Pusat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	1.816.179.456	2.041.346.368
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Utara	847.390.842	282.536.560
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Utara	2.146.661.994	2.215.435.296
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Utara	834.115.771	883.371.033

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penyediaan Perlengkapan Kerja Pendamping Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Utara	2.007.434	0
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Utara	2.669.916.240	2.669.916.240
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Utara	7.009.649.243	6.580.568.743
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Utara	7.066.428.188	7.129.911.236
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penyediaan Perlengkapan Kerja Pendamping Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Utara	2.007.434	0
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	51.229.985	31.379.853
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.035.000	2.035.000
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	57.791.800	0
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.288.217	55.288.217
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.159.935	9.830.865

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
	Daerah Provinsi					
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	42.130.620	42.130.620
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman	55.200.000	55.200.000
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Air dan Listrik di Lokasi Binaan	152.657.494	159.139.829
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa internet Kantor Sudin PPKUKM Jakarta Utara	2.565.455	0
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan sewa mesin foto copy	37.461.600	37.461.600
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa petugas keamanan Lokasi Binaan	1.362.134.592	1.531.009.776
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan perlengkapan petugas keamanan Lokasi Binaan	1.386.440	0
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	3.842.000	3.842.000
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	18.384.190	18.384.190
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kerja	24.425.852	24.425.852
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Mesin Lainnya	15.055.810	0

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Lokasi Binaan	1.135.112.160	1.275.841.480
Sudin PPKUKM Jakarta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Lokasi Binaan	40.380.538	40.380.538
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Barat	2.809.793.625	2.824.804.743
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Barat	1.208.864.012	365.099.500
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Barat (Lokasi Sementara)	696.909.638	696.909.638
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penyediaan Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Barat	16.481.432	16.481.432

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
			Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Perencanaan Gedung Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Barat	79.200.000	79.200.000
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Barat	3.640.648.096	3.640.648.096
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Barat	9.038.336.192	8.584.329.692
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Barat	7.653.292.430	7.737.936.494
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penyediaan Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Barat	15.511.936	15.511.936
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	51.229.985	31.379.853
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.440.300	3.940.300
Sudin PPKUKM	Program Penunjang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak	Penyediaan Barang Cetak	29.397.286	29.397.286

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Jakarta Barat	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		dan Penggandaan	dan Penggandaan		
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	24.904.800	40.521.300
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62.210.951	62.210.951
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.268.671	59.268.671
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.136.000	7.526.420
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	408.838.078	284.404.505
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	37.461.600	37.461.600
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	2.270.224.320	2.551.682.960
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Keamanan Kantor	14.520.000	14.520.000
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor/Lapangan	19.254.400	19.254.400
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	2.270.224.320	2.551.682.960
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	8.977.500	8.977.500
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	55.704.440	55.704.440

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
			Operasional atau Lapangan			
Sudin PPKUKM Jakarta Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	8.394.760	8.394.760
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Selatan	3.466.325.256	3.577.420.590
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Selatan	1.293.524.032	389.572.500
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Selatan	410.344.180	368.581.844
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Selatan (Lokasi Sementara)	3.808.576.882	3.808.576.882

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
			Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penyediaan Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Selatan	21.796.698	21.796.698
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Selatan	4.438.293.736	4.438.293.736
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Selatan	8.234.931.650	8.340.736.730
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Selatan	11.071.431.880	10.630.146.880
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penyediaan Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Selatan	20.758.760	20.758.760
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	51.229.985	31.379.853
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.707.200	2.500.000
Sudin PPKUKM	Program Penunjang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	86.864.228	86.864.228

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Jakarta Selatan	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Perlengkapan Kantor			
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.432.254	90.432.254
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.531.835	4.531.835
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	16.142.000	16.142.000
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.204.000	6.204.000
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	5.644.001	5.644.001
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	37.461.600	37.461.600
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	1.191.867.768	1.339.633.554
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Keamanan Kantor	20.328.000	20.328.000
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	79.896.513	79.896.513
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	6.834.400	6.834.400
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	32.449.747	32.449.747
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	1.418.890.200	1.594.801.850

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
	Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah	Lainnya			
Sudin PPKUKM Jakarta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor/Lapangan	45.678.369	45.678.369
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Timur	3.545.785.956	3.625.663.290
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Timur	1.183.077.632	343.926.100
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Timur	2.948.084.850	3.208.014.194
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rehab Gedung Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Timur	625.372.249	625.372.249

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
			Pengentasan Kemiskinan			
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penyediaan Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Timur	42.156.114	42.156.114
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Timur	5.012.316.518	5.012.316.518
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Timur	10.235.606.990	9.770.066.990
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Timur	8.237.865.350	8.343.670.430
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penyediaan Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Timur	40.148.680	40.148.680
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Cukai	51.229.985	31.379.853
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4.129.500	4.129.500
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.860.190	32.860.190
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.699.765	231.699.765

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.996.943	4.996.943
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	28.793.600	28.793.600
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/Peralatan Kerja	16.510.960	36.510.959
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	37.461.600	37.461.600
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	2.440.491.144	2.740.683.948
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Keamanan Kantor	40.034.720	40.034.720
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	51.572.961	51.572.961
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	57.385.407	49.534.407
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	35.834.997	35.834.997
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	2.837.780.400	3.186.841.800
Sudin PPKUKM Jakarta Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor/Lapangan	52.612.802	52.612.802

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Kepulauan Seribu	584.981.064	606.142.080
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Kepulauan Seribu	202.216.476	196.616.476
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Kepulauan Seribu	2.074.629.833	1.696.341.681
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Kepulauan Seribu	8.029.736	8.029.736

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraan Bazar UKM di Wilayah Kepulauan Seribu	1.261.204.612	1.047.620.602
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Partisipasi Pameran Produk Unggulan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	262.296.260	143.496.260
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Kepulauan Seribu	584.981.064	606.142.080
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Kepulauan Seribu	612.826.220	612.826.220
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Desain Kemasan di Wilayah Kepulauan Seribu	44.615.760	38.558.560
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal di Wilayah Kepulauan Seribu	102.737.700	97.553.100
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Fasilitas Sertifikasi Merek di Wilayah Kepulauan Seribu	34.217.700	34.217.700
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Kepulauan Seribu	8.029.736	8.029.736
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.000.000	3.000.000
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Akomodasi dan Transportasi di Kepulauan Seribu	291.554.090	239.708.090

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana di Kepulauan Seribu	14.034.240	14.034.240
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.109.744	146.109.744
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	38.789.669	38.789.669
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.912.150	3.912.150
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	5.765.000	0
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.784.820	28.284.820
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	63.847.581	51.390.081
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	37.461.600	37.461.600
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO	363.000	363.000
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Pemeliharaan Rutin KDO	3.421.770	3.421.770
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	10.484.549	7.527.894
Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Pemeliharaan Perlengkapan Kerja	3.982.968	3.982.968

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Metrologi	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kemetrollogian (PHL)	1.702.668.240	1.913.762.220
Metrologi	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Pasar dan Pembentukan Daerah Tertib Ukur	3.500.000	0
Metrologi	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Penyediaan Alat Penunjang Kemetrollogian	293.392.990	293.392.990
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.877.000	2.877.000
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	208.414.932	208.414.932
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	130.707.885	130.707.885
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	736.010.242	408.948.782
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	105.554.760	105.554.760
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman	182.652.800	182.652.800
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	37.461.600	37.461.600
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	15.476.000	14.780.000
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	179.928.483	179.928.483

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Standarisasi Kemetrologian	167.037.970	167.037.970
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	92.262.852	92.262.852
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kemetrologian	3.081.655.181	3.081.655.181
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Pendingin	112.707.694	112.707.694
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan	10.321.630	10.321.630
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Pengelolaan Air Limbah	128.854.880	128.854.880
Metrologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung Instalasi	16.552.707.482	476.764.530
Pusdiklat	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Dasar-Dasar Perkoperasian	33.330.000	31.705.000
Pusdiklat	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Dasar-Dasar Perkoperasian di Wilayah Kepulauan Seribu (P. Panggang dan Pramuka)	78.187.740	66.606.740
Pusdiklat	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Manajemen Koperasi Berbasis Syariah (DAK)	355.485.788	355.485.788

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Pusdiklat	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Kompetensi Bagi Pengurus/Pengelola KSP/USP (DAK)	375.697.386	375.697.386
Pusdiklat	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP dan USP (DAK)	445.655.233	445.655.233
Pusdiklat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pendampingan Koperasi dan UKM (DAK)	363.000.000	363.000.000
Pusdiklat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pelatihan Perpajakan (DAK)	480.030.928	480.030.928
Pusdiklat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pelatihan Prosedur Ekspor (DAK)	478.302.741	478.302.741

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Pusdiklat	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Layanan Bantuan Hukum (DAK)	394.720.000	394.628.407
Pusdiklat	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelatihan Kewirausahaan di Wilayah Kepulauan Seribu (P. Panggang dan Pramuka)	70.174.740	63.570.740
Pusdiklat	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelatihan Komunikasi dan Negosiasi Bisnis Bagi UKM	63.410.000	61.785.000
Pusdiklat	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelatihan Manajemen Biaya Bagi UKM	34.990.000	33.365.000
Pusdiklat	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelaksanaan Bimtek Strategi Perolehan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	41.630.000	40.005.000
Pusdiklat	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Diklat Peningkatan SDM Pendamping Kecamatan	76.440.000	74.490.000
Pusdiklat	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pelaksanaan Bimtek Desain Kemasan/Packaging	51.120.000	49.365.000
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3.518.000	3.518.000
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	77.708.747	77.708.747
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	66.811.107	66.811.107

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
	Pemerintahan Daerah Provinsi		Kantor	Kantor		
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.012.330	1.012.330
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.759.700	15.759.700
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	15.054.420	15.054.420
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.408.000	24.252.000
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	117.480.000	107.690.000
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI)	142.154.070	141.154.070
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	340.533.648	382.752.444
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Keamanan Kantor	13.866.820	13.866.820
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.083.759	9.083.759
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	12.961.498	12.961.498
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Pendingin	12.712.480	11.314.546
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	170.266.824	191.376.222

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	49.500.227	20.858.745
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	47.237.168	47.237.168
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Mekanikal Elektrikal	56.755.608	63.792.074
Pusdiklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal	17.612.287	15.741.759
UPK PPUKM Pulogadung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan	2.724.269.184	3.062.019.552
UPK PPUKM Pulogadung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Honor Pegawai Non PNS	2.838.822.074	2.765.744.294
UPK PPUKM Pulogadung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	340.533.648	382.752.444
UPK PPUKM Pulogadung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Penyediaan Operasional BLUD	5.101.512.957	5.101.512.957
UPKB2T	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Audit Internal	17.031.080	6.031.080
UPKB2T	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen	6.005.180	6.005.180
UPKB2T	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium	40.653.600	18.773.600
UPKB2T	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Surveil Laboratorium	73.879.500	72.324.500

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
UPKB2T	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pengembangan Kemampuan Uji Personil Laboratorium	70.431.080	70.431.080
UPKB2T	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Penyediaan Jasa Petugas Laboran	1.135.112.160	1.275.841.480
UPKB2T	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pemeliharaan Sistem Informasi Laboratorium	45.130.536	45.130.536
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.615.900	2.615.900
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	77.649.611	77.649.611
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.523.825	225.523.825
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.367.200	90.367.200
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Pengadaan Bahan dan Alat Bantu Laboratorium	628.041.393	586.924.493
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	16.741.080	25.207.000
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Suplemen Gizi Untuk SDM Laboratorium	128.691.304	128.660.224
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	96.278.700	52.497.820
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Alat Uji Laboratorium	4.559.648.931	3.922.959.008
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	406.813.121	392.813.201
UPKB2T	Program Penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	37.513.400	37.461.600

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah	Perlengkapan Kantor			
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	340.533.648	382.752.444
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Keamanan Kantor	8.373.816	8.373.816
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	4.388.300	4.388.300
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	52.882.693	52.882.693
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat dan Perkakas Kerja Laboratorium	714.739.652	660.799.452
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalibrasi Alat Laboratorium	208.137.440	208.106.360
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	102.030.555	102.030.555
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Pendingin	43.355.312	38.611.584
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Jaringan Listrik	11.247.500	11.247.500
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Mekanikal Elektrikal	61.209.544	63.792.074
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	283.778.040	318.960.370

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
	Daerah Provinsi	Pemerintahan Daerah	Lainnya			
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	21.547.735	21.547.735
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penanganan Limbah Laboratorium	96.052.000	52.389.780
UPKB2T	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Laboratorium	116.595.990	116.595.990
UPPISP	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Penyediaan Jasa Laboran	1.135.112.160	1.275.841.480
UPPISP	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Audit Internal Standar Kompetensi Laboratorium Pengujian	18.000.000	18.000.000
UPPISP	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Uji	18.000.000	18.000.000
UPPISP	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Survailen Laboratorium Uji	79.500.000	79.500.000
UPPISP	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Uji	61.076.840	61.076.840
UPPISP	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pengembangan Kompetensi SDM Laboratorium	180.505.500	130.771.200
UPPISP	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pengujian	81.900.000	81.900.000
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4.460.980	4.460.980
UPPISP	Program Penunjang Urusan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	83.751.883	83.751.883

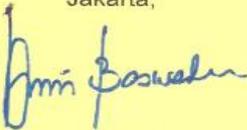
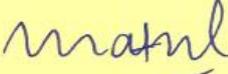
SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
	Pemerintahan Daerah Provinsi		Kantor			
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	435.543.610	435.543.610
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Suplemen Gizi SDM laboratorium	133.973.400	133.973.400
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.130.000	42.130.000
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.900.309	41.900.309
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	36.147.810	36.147.810
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Pengisian Gas Instrumentasi Laboratorium	72.748.500	72.748.500
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Pengadaan Bahan Kimia dan Alat Bantu Laboratorium	487.349.291	487.349.291
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Pengadaan Bahan Penunjang Pengujian	200.005.023	200.005.023
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Pengadaan Bahan Penunjang Laboratorium	203.644.860	203.644.860
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Alat Uji Laboratorium	6.069.723.550	6.069.723.550
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	692.195.950	687.515.950
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	37.461.600	37.461.600
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	1.191.867.768	1.339.633.554
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Petugas Penerima Tamu/Front Officer	113.511.216	127.584.148

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
	Pemerintahan Daerah Provinsi	Daerah				
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	73.016.240	73.016.240
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.098.574	72.098.574
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Uji Laboratorium	622.794.695	622.794.695
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kalibrasi Alat Uji Laboratorium	221.267.084	221.267.084
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	74.684.357	74.684.357
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Pendingin	28.474.116	28.474.116
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	964.845.336	1.084.465.258
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penanganan Limbah laboratorium	121.892.320	121.892.320
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin gedung kantor	239.426.871	239.426.871
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	56.500.686	56.500.686
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Petugas Mekanikal Elektrikal	113.511.216	127.584.148

SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	APBD 2022	APBDP 2022
UPPISP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal	2.441.824	2.441.824
Pusdatin	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pengelolaan Sistem Informasi Dinas PPKUKM	585.030.352	489.665.152
Pusdatin	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Dashboard Platform Jakpreneur	183.991.132	183.869.332
Pusdatin	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pengelolaan Media Sosial Jakpreneur	134.400.000	134.400.000
Pusdatin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	94.999.949	94.999.949
Pusdatin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.992.621	19.992.621

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM juga menyusun Perjanjian Kinerja dari tingkat Kepala Dinas sebagai Pejabat Eselon II sampai dengan Pejabat Eselon IV.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM adalah sebagai berikut:

 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama :	ELISABETH RATU RANTE ALLO
Jabatan :	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama :	ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan :	Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
<p>PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Jakarta, 6 Februari 2022	
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
	
ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D	ELISABETH RATU RANTE ALLO NIP 197009241998032004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Elisabeth Ratu Rante Allo
 NIP : 197009241998032004
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Meningkatkan peran sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap perekonomian DKI Jakarta	1	Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan	e-SAKIP	Definisi: Jumlah pertumbuhan wirausaha baru dan/atau wirausaha naik kelas binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM. Metode Pengukuran: realisasi wirausaha pemula yang telah mendaftar dan telah mengikuti sebagian pertimbangan kekinis, sarana tempat dalam upaya peningkatan omzet, aset ditambah jumlah tenaga kerja, yang terdaftar pada sistem informasi pada tahun n Sumber Data: Sistem Jakpreneur	N/A	N/A	N/A	33,357	33,357	Wirausaha
2	Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta	1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRS ADB DKI Jakarta	e-SAKIP	Definisi: Nilai transaksi domestik untuk keseluruhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan tujuan untuk konsumsi. Metode Pengukuran: Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 (tanpa memperhitungkan kepentrikan) Sumber Data: BRG BPS Provinsi DKI Jakarta, Semester I Tahun 2022	N/A	N/A	N/A	212.009.400.000,000	212.009.400.000,000	Rupiah
3	Meningkatnya kewirausahaan yang bernilai saling	1	Jumlah omzet yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	e-SAKIP	Definisi: Jumlah omzet yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas PPK,UKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat di dalam sistem Jakpreneur. Penentuan target ditentukan dengan menghitung 50% linan yang sudah mempunyai usaha a asumsi omzet per tahun sebesar Rp 8.000.000 Metode Pengukuran: Asumsi Target Omzet per triwulan: TW I : 5% TW II : 10% TW III : 35% TW IV : 50% Sumber Data: Sistem Jakpreneur	21.319.650.000	42.639.300.000	149.237.550.000	213.196.600.000	426.351.000.000	Rupiah
4	Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta	1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB ACHB DKI Jakarta	e-SAKIP	Definisi: Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi industri pengolahan dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta Metode Pengukuran: Nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun pada sektor industri, di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 (tanpa memperhitungkan kepentrikan) Sumber Data: BRS BPS Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2022	N/A	N/A	N/A	134.471.200.000,000	134.471.200.000,000	Rupiah

<p>5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>e-SAKIP</p>	<p>Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 komponen pada subkategori di bawah Program Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu: a. Penyerapan Anggaran, komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran > 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialokasikan kembali untuk subkegiatan lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat diukur dengan analisis e-monev Anggaran hasil laporan POU/KPD Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran >80% dan output 100% Realisasi = (40%) + (Nilai Efisiensi x 10%/(20%)) + (50%) 2. Serapan Anggaran <80% dan output <=100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran x 40%) + (pencapaian output x 50%) 3. Serapan Anggaran <=80%, namun output <=100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%) Sumber Data: Sistem eMonev dan eSAKIP (online)</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>91%</p>	<p>91%</p>	<p>Persentase</p>	
<p>6. Meningkatnya kewirausahaan baru</p>	<p>1. Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20)</p>	<p>e-Monev KSD</p>	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20)</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Persentase</p>	
<p>7. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kebudayaan yang berkualitas bagi semua</p>	<p>1. Persentase penyelesaian rencana aksi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Beradikasi dan Integratif Nomor (12)</p>	<p>e-Monev KSD</p>	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Beradikasi dan Integratif Nomor (12)</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Persentase</p>	
<p>8. Tersedianya stok kebutuhan pangan yang menjamin jumlah dan kualitas serta terjangkau bagi masyarakat</p>	<p>1. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Penyaliran Subsidy Pangan, Optimalisasi Pengalihan Sistem Pengudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan Nomor (15)</p>	<p>e-Monev KSD</p>	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Penyaliran Subsidy Pangan, Optimalisasi Pengalihan Sistem Pengudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan Nomor (15)</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Persentase</p>	
<p>9. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkeadilan, berkeseluruhan prasarana pendukungnya</p>	<p>1. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)</p>	<p>e-Monev KSD</p>	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>Persentase</p>	
<td data-bbox="510 1018 770 1066"> <p>2. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman dan Masyarakat Nomor (45)</p> </td> <td data-bbox="770 1018 837 1066"> <p>e-Monev KSD</p> </td> <td data-bbox="837 1018 1429 1066"> <p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman dan Masyarakat Nomor (45)</p> </td> <td data-bbox="1429 1018 1518 1066"> <p>N/A</p> </td> <td data-bbox="1518 1018 1608 1066"> <p>100%</p> </td> <td data-bbox="1608 1018 1697 1066"> <p>100%</p> </td> <td data-bbox="1697 1018 1809 1066"> <p>N/A</p> </td> <td data-bbox="1809 1018 1921 1066"> <p>N/A</p> </td> <td data-bbox="1921 1018 2022 1066"> <p>100%</p> </td> <td data-bbox="1921 1018 2022 1066"> <p>Persentase</p> </td>	<p>2. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman dan Masyarakat Nomor (45)</p>	<p>e-Monev KSD</p>	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman dan Masyarakat Nomor (45)</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>Persentase</p>
<p>10. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, modernis, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga sekitar</p>	<p>1. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Linggo Nomor (29)</p>	<p>e-Monev KSD</p>	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Linggo Nomor (29)</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>Persentase</p>
<td data-bbox="510 1161 770 1209"> <p>2. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)</p> </td> <td data-bbox="770 1161 837 1209"> <p>e-Monev KSD</p> </td> <td data-bbox="837 1161 1429 1209"> <p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)</p> </td> <td data-bbox="1429 1161 1518 1209"> <p>100%</p> </td> <td data-bbox="1518 1161 1608 1209"> <p>N/A</p> </td> <td data-bbox="1608 1161 1697 1209"> <p>N/A</p> </td> <td data-bbox="1697 1161 1809 1209"> <p>N/A</p> </td> <td data-bbox="1809 1161 1921 1209"> <p>N/A</p> </td> <td data-bbox="1921 1161 2022 1209"> <p>100%</p> </td> <td data-bbox="1921 1161 2022 1209"> <p>Persentase</p> </td>	<p>2. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)</p>	<p>e-Monev KSD</p>	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>Persentase</p>
<p>11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel</p>	<p>1. Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (38)</p>	<p>e-Monev KSD</p>	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (38)</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Persentase</p>	
<td data-bbox="510 1283 770 1331"> <p>2. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemeliharaan Nomor (81)</p> </td> <td data-bbox="770 1283 837 1331"> <p>e-Monev KSD</p> </td> <td data-bbox="837 1283 1429 1331"> <p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemeliharaan Nomor (81)</p> </td> <td data-bbox="1429 1283 1518 1331"> <p>N/A</p> </td> <td data-bbox="1518 1283 1608 1331"> <p>100%</p> </td> <td data-bbox="1608 1283 1697 1331"> <p>N/A</p> </td> <td data-bbox="1697 1283 1809 1331"> <p>100%</p> </td> <td data-bbox="1809 1283 1921 1331"> <p>100%</p> </td> <td data-bbox="1921 1283 2022 1331"> <p>100%</p> </td> <td data-bbox="1921 1283 2022 1331"> <p>Persentase</p> </td>	<p>2. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemeliharaan Nomor (81)</p>	<p>e-Monev KSD</p>	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemeliharaan Nomor (81)</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Persentase</p>
<p>12. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi</p>	<p>1. Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)</p>	<p>e-Monev KSD</p>	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Persentase</p>	

SASARAN KHUSUS											
13	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe II	e-Kinerja	Jumlah realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III	N/A	N/A	N/A	1	1	Paket
14	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Penyusunan pelaksanaan badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kapabilitas terhadap pemantauan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK: WTP=100%, WLP=200%, TW=100%, TM=325%)	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Procure dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) daring makan minimum aset, jaminan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data : Data Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) di MC Kode Rekening Mekanis Minimum (Dikembangkan : rtuk Celan, Koci, Ten, Cuis, dtd.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	a) Persentase teraksennya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase teraksennya editorial plan annual strategy komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika melalui plan lengkap Prowas. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktif via media. Penghitungan a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releaseman dan pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (redaksi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau lainnya yang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat RAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat
18	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikondisikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100, A = >80-90, BB = >70-80, B = >60-70, CC = >50-60, C = >40-50; D = 0-30 Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB	N/A	N/A	N/A	95	50	Nilai
19	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persurutan	1	Jumlah Surat dan Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengontrolan dan pelaporan dapat dirincikan dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk", "Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi Keluar" yang ada pada e-office. Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E-office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi (NK) dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
20	Peningkatan penggunaan e-Procus hukum	1	Jumlah pebalikbud hukum yang dibuat melalui sistem e-procal	e-Kinerja	Peningkatan antara sistem e-procal ke aplikasi e-office. Pembentukan TTE dan e-procal hukum menjadi salah satu bagian dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-procal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rkap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase
21	Menyebarkan city branding kota Jakarta melalui event di Jakarta	1	Jumlah kolaborasi Jakarta	e-Kinerja	Jumlah kolaborasi yang aktif pada tahun 2022 dan terakun melalui platform kolaborasi, baik dalam bentuk PKG maupun non PKG (bukan bersifat partisipasi)	N/A	N/A	N/A	50	50	kolaborasi (per OPD)

SABARAN OPERASIONAL											
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	(Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat / Jumlah TL Aduan Masyarakat) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
23	Terselenggaranya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (paper, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
24	Terselenggaranya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan sistematis (SPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan sistematis (SPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasi / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang di terima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Validasi oleh Inspektoral)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota

Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D

Jakarta, Februari 2022

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta,



Elizabeth Ratu Rani Ali
NIP. 197005041998020004

2.3. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2017 – 2022 terdapat beberapa Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta berperan dalam pencapaian salah satu Tujuannya yaitu **“Mempercepat Regenerasi Kota demi mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Layak Huni”**.

Untuk mencapai Tujuan di atas, Sasaran pada RPJMD Perubahan Tahun 2017 – 2022 yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta adalah **“Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah”** dengan Indikator Sasarannya adalah **Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan**, dimana Definisi Operasionalnya adalah Penambahan jumlah pelaku kewirausahaan di DKI Jakarta setiap tahun yang mencakup pelaku wirausaha pemula dan pelaku wirausaha yang naik kelas.

Indikator Sasaran Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan sendiri diampu oleh 5 (lima) SKPD dengan pembagian targetnya sebagai berikut:

SKPD	Kondisi Awal	Target (Wirausaha)					Target 2018 - 2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	63.680	12.000	33.359	33.359	33.359	33.357	145.434
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	962	1.037	3.399	3.399	3.399	3.399	14.633
Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan pangan	4.062	5.277	6.179	6.179	6.179	6.179	29.993
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	3.909	100	2.460	2.460	2.460	2.460	9.940
Dinas Sosial	840	890	1157	1157	1157	1157	5.518
TOTAL	73453	19304	46554	46554	46554	46552	205.518

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. TARGET PERJANJIAN KINERJA DINAS PPKUKM

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM memiliki Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional, yang masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sebagai berikut

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SASARAN STRATEGIS				
1	Meningkatkan Peran Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap Perekonomian DKI Jakarta	Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan	33.357	Wirausaha
2	Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	212.009.400.000.000	Rupiah
3	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	426.393.000.000	Rupiah
4	Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta	134.471.200.000.000	Rupiah
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	Persentase
6	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	Persentase
7	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian Rencana Aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12)	100%	Persentase
8	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (nomor 15)	100%	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
9	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (KSD Nomor 14)	100%	Persentase
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100%	Persentase
10	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	Persentase
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	Persentase
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	Persentase
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	Persentase
SASARAN KHUSUS				
13	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III	1	Paket
14	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan keuangan daerah	3 (WTP)	Predikat
15	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	Persentase
16	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	Persentase
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	91	Predikat
18	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95	Nilai
19	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	100%	Persentase
20	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
21	Menyebarkan city branding kota Jakarta melalui event di Jakarta	Jumlah kolaborator Jakarta	50	kolaborator (per OPD)
SASARAN OPERASIONAL				
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Persentase
23	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	Persentase
24	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Persentase

2. REALISASI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Realisasi Perjanjian Kinerja DPPKUKM Tahun 2022

Sesuai dengan target Perjanjian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, berikut realisasi capaian Perjanjian kinerja DPPKUKM Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
SASARAN STRATEGIS								
1	Peningkatan Pelaku Kewirausahaan - Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan	pelaku usaha - wira usaha	33.359	33.357	70.665	34.920	211,83%	104,69%
2	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	rupiah	212.009.400.000.000	212.009.400.000.000	363.850.000.000.000	410.050.000.000.000	171,62%	193,41%
3	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	rupiah	244.401.000.000	426.393.000.000	1.626.555.796.924	3.680.282.663.323	665,53%	863,12%
4	Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta	rupiah	134.471.200.000.000	134.471.200.000.000	264.400.000.000.000	291.350.000.000.000	196,62%	216,66%
5	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91%	91%	91,56%	92,63%	100,62%	101,79%
6	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	Persentase	100%	100%	99,65%	99,74%	99,65%	99,74%
7	Persentase penyelesaian Rencana Aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan	Persentase	-	100%	-	100%	-	100,00%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12)							
8	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (nomor 15)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
9	Persentase penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (KSD Nomor 14)	Persentase	-	100%	-	100%		100,00%
	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
10	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
11	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan bInstansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
12	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
SASARAN KHUSUS								
13	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Paket	-	1	-	1	-	100,00%
14	Opini laporan keuangan daerah	Predikat	3 (WTP)	3 (WTP)	3 (WTP)	3 (WTP)	100%	100,00%
15	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
16	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
17	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Predikat	A (81)	91%	AA (94,20)	95,31%	100%	104,74%
18	Nilai PMPRB	Nilai	92	95%	99,29	98,81%	107,92%	104,01%
19	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Persentase	-	100%	-	100%	-	100,00%
20	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Persentase	-	100%	-	100%	-	100,00%
21	Jumlah kolaborator Jakarta	Kolaborator (per OPD)	-	50	-	85	-	170,00%
SASARAN OPERASIONAL								
22	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100%	100%	100%	99,86%	100%	99,86%
23	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
24	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%

Berdasarkan data diatas,realisasi Indikator Perjanjian Kinerja DPPKUKM Tahun 2022 rata – rata meningkat dibandingkan Tahun 2021, maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis, sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan

Definisi operasional dari indikator jumlah pertumbuhan kewirausahaan adalah jumlah pertumbuhan wirausaha baru dan/atau wirausaha naik kelas binaan Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, UKM. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020, definisi Wirausaha Baru adalah wirausaha pemula yang telah mendaftar dan telah mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu dalam upaya peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, data realisasi jumlah pertumbuhan kewirausahaan yaitu berdasarkan data Pendaftaran, karena setiap peserta Jakprenur yang telah terdaftar di dalam sistem akan didampingi atau diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu untuk peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja. Setiap peserta yang terdaftar dapat mengikuti tahapan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) tanpa harus berurutan.

Pada tahun 2022, jumlah pertumbuhan kewirausahaan mencapai target yaitu sebanyak 34.920 wirausaha dari target 33.357, yang terdiri dari 6.984 IKM dan 27.936 UKM. Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan Tahun 2022 ini tidak sebanyak Tahun 2021 yang berjumlah 70.665, hal ini dikarenakan kebijakan Dinas PPKUKM pada tahun 2022 lebih berfokus dalam peningkatan kualitas dibandingkan kuantitas. Realisasi atas indikator tersebut di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2021 dan 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Wilayah	2021			2022		
		Jumlah Wirausaha Baru berdasarkan Pendaftaran pada Sistem Jakprenur		Total per Wilayah	Jumlah Wirausaha Baru berdasarkan Pendaftaran pada Sistem Jakprenur		Total per Wilayah
		IKM	UKM		IKM	UKM	
1	Jakarta Pusat	2176	11.908	14.084	1294	5.177	6.471
2	Jakarta Utara	3167	6.654	9.821	925	3.701	4.626
3	Jakarta Barat	6852	6.417	13.269	1330	5.318	6.648
4	Jakarta Selatan	5.808	10.882	16.690	1.757	7.026	8.783
5	Jakarta Timur	5.734	10.945	16.679	1.666	6.665	8.331
6	Kepulauan Seribu	25	97	122	12	49	61
JUMLAH		23.762	46.903	70.665	6.984	27.936	34.920

Program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya:

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki 4 Indikator Kinerja Program, dimana salah satunya indikatornya adalah jumlah wirausaha industri baru

dengan target di tahun 2022 sebesar 5.560 dan terealisasi sebesar 6.984 wirausaha. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:

- a) Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan Aktivitas Sub Keegiatannya adalah:
 - Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Pendampingan Kewirausahaan IKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki Indikator Kinerja Program pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:
 - a) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan Aktivitas Sub Keegiatannya adalah:
 - Pembinaan Kewirausahaan UKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Pendampingan Kewirausahaan UKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Penumbuhan Wirausaha Industri Baru dan Pembinaan Kewirausahaan UKM di lima wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan – pelatihan soft skill dan hard skill yang diberikaan kepada masyarakat untuk menciptakan wirausaha baru.

Pendampingan Kewirausahaan IKM dan Pendampingan Kewirausahaan UKM di lima wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilaksanakan dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat oleh tenaga pendamping tingkat Kecamatan untuk dapat menjadi wirausaha baru dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pendaftaran
Tahap Awal yang dilaksanakan dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) agar peserta terdaftar dan terdata dalam sistem PKT DKI Jakarta
- b) Pelatihan
Peserta diberikan Materi Pelatihan tentang Kewirausahaan oleh Narasumber

dari PGO dan IPB yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

c) Pendampingan

Dalam tahap ini para peserta PKT di berikan pendampingan di Kantor Kecamatan setiap hari Sabtu Pukul 08.00 – 11.00 WIB, selain itu Pendampingan dapat dilakukan juga dalam bentuk jemput bola ke tempat usaha UKM di Wilayah Binaan

d) Perizinan

Dalam tahap Perizinan para PKT didampingi oleh pendamping dan Perizinan di keluarkan oleh PTSP tingkat Kelurahan tanpa dipungut biaya

e) Pemasaran

Para Anggota PKT diberikan fasilitas untuk memasarkan Produk di Bazar-bazar yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan, Kota ataupun Provinsi serta Event-event besar lainnya

f) Pelaporan Keuangan

Dalam tahap ini para peserta / anggota PKT diberikan Pelatihan tentang pengelolaan keuangan suatu usaha agar usaha yang dijalankan dapat terus meningkat dan naik kelas dalam level usahanya

g) Perizinan

Dalam tahapan ini para anggota PKT yang telah menyelesaikan 6 tahapan diberikan surat keterangan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pinjaman permodalan di Bank yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

b. Capaian Indikator Kinerja Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, nilai kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Periode	Nilai (dalam trilyun rupiah)
1	Tw 1	130,70
2	Tw 2	137,55
3	Tw 3	141,80
4	Tw 4	Belum ada data
TOTAL		410,05

(sumber BPS Provinsi DKI Jakarta)

Nilai Kontribusi sektor perdagangan untuk tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta s.d 31 Desember 2022 baru s.d triwulan 3 dengan nilai sebesar Rp.410.050.000.000.000. Jika dibandingkan dengan data tahun 2021, Nilai Kontribusi sektor Perdagangan s.d triwulan III tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 12,70%

No	Periode	Tahun 2021	Tahun 2022	Pertumbuhan
		Nilai (dalam trilyun rupiah)	Nilai (dalam trilyun rupiah)	
1	Tw 1	121,61	130,70	7,47%
2	Tw 2	121,27	137,55	13,42%
3	Tw 3	120,97	141,80	17,22%
TOTAL		363,85	410,05	12,70%

(Sumber Data Tahun 2021: eSAKIP)

Program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja tersebut, diantaranya:

- 1) Program Pengembangan Ekspor, dengan Indikator Kinerja Program jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program tersebut yaitu:
 - a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Aktivitas Sub Keempatannya:
 - Partisipasi Pada Pameran di Luar Negeri.
 - Penyelenggaraan Bazaar UKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Partisipasi Pameran Produk Unggulan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 2) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan Indikator Kinerja Programnya:
 - Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrollogian yang diawasi.
 - Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti.
 - Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:

- a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan Aktivitas Sub Keempatannya:
 - Pengawasan Kemetrollogian Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan

- Perengkapannya) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
- Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Pasar dan Pembentukan Daerah Tertib Ukur
 - Penyediaan Alat Penunjang Kemetrolgian
- b) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa Aktivitas Sub Keegiatannya:
- Pengawasan Produk SNI Wajib.
 - Pengadaan Alat Test Uji Cepat.
 - Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Uji.
 - Pelaksanaan Surveilen Laboratorium, dsb.
- c) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan Aktivitas Sub Keegiatannya:
- Pembinaan Gerakan Konsumen Cerdas
 - Belanja Hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan Indikator Kinerja Program Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri. Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program tersebut yaitu:
- a) Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan Aktivitas Sub Keegiatannya:
- Partisipasi pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI)
 - Partisipasi Pameran Dalam Kota
 - Penyediaan Kios Jakpreneur
- 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan Indikator Kinerja Program Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:
- a) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan Aktivitas Sub Keegiatannya:
- Akta Pembuatan Akta Pendirian Koperasi
- 5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan Indikator Kinerja Program Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:
- a) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi yang

Mendapat Fasilitas Penerbitan Akta Pendirian, dengan Aktivitas Sub Keegiatannya:

- Pelatihan Dasar-Dasar Perkoperasian
- Pelatihan Dasar-Dasar Perkoperasian di Wilayah Kepulauan Seribu (P. Panggang dan Pramuka)
- Pelatihan Manajemen Koperasi Berbasis Syariah (DAK).
- Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP dan USP (DAK).
- Pelatihan Kompetensi Bagi Pengurus/Pengelola KSP/USP (DAK).

6) Program Pengembangan UMKM dengan Indikator Kinerja Program Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:

a) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, dengan beberapa Aktivitas Sub Keegiatannya:

- Pelatihan Kewirausahaan di Wilayah Kepulauan Seribu (P. Panggang dan Pramuka)
- Pelatihan Komunikasi dan Negosiasi Bisnis Bagi UKM
- Pelatihan Manajemen Biaya Bagi UKM
- Pelaksanaan Bimtek Strategi Perolehan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
- Diklat Peningkatan SDM Pendamping Kecamatan
- Pelaksanaan Bimtek Desain Kemasan/Packaging

c. Capaian Indikator Kinerja Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta

Definisi dari indikator tersebut adalah Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdata di dalam sistem Jakpreneur. Pada tahun 2022, nilai jumlah omset yang dihasilkan sebesar Rp 3.680.282.663.323 dengan capaian sebesar 863,12% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tahun 2022 ini juga naik dibandingkan dengan capaian 2021 yang sebesar 665,53%. Kenaikan omset tersebut selain dikarenakan fasilitasi pemasaran yang diberikan juga karena adanya pendampingan terhadap UMKM untuk memberikan laporan omset yang didapatkan ke dalam sistem Jakpreneur.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja tersebut, adalah:

1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Indikator Kinerja Program Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program

tersebut yaitu:

- a) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan beberapa Aktivitas Sub Keegiatannya:
 - Pengelolaan Jakarta Creative Hub.
 - Pembinaan Kewirausahaan UKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Pendampingan Kewirausahaan UKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Pusat, Barat, Selatan dan Kepulauan Seribu
 - Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Pusat, Selatan, Timur dan Utara, dsb.

- d. Capaian Indikator Kinerja Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, nilai kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Periode	Nilai (dalam trilyun rupiah)
1	Tw 1	97.73
2	Tw 2	95.15
3	Tw 3	98.47
4	Tw 4	Belum ada data
TOTAL		291.35

(sumber BPS Provinsi DKI Jakarta)

Nilai Kontribusi sektor perindustrian untuk tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta s.d 31 Desember 2022 baru s.d triwulan 3 dengan nilai sebesar Rp.291.350.000.000.000. Jika dibandingkan dengan data tahun 2021, Nilai Kontribusi sektor perindustrian s.d triwulan III tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 10.19%.

No	Periode	Tahun 2021	Tahun 2022	Pertumbuhan
		Nilai (dalam trilyun rupiah)	Nilai (dalam trilyun rupiah)	
1	Tw 1	87.45	97.73	11.76%
2	Tw 2	86.36	95.15	10.18%
3	Tw 3	90.59	98.47	8.70%
TOTAL		264.40	291.35	10.19%

(Sumber Data Tahun 2021: eSAKIP)

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja tersebut, adalah:

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Indikator Kinerja Programnya yang terdiri dari:

- Jumlah wirausaha industri baru
- Persentase jumlah IKM yang
- Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif
- Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:

a) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan Aktivitas Sub Keegiatannya:

- Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Pendampingan Kewirausahaan IKM di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- Pendampingan Desain Kemasan di Wilayah Kepulauan Seribu
- Pendampingan industri kreatif Fashion & Kerajinan, dsb.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan Indikator Kinerja Programnya Persentase produk industri dengan standar SNI. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program tersebut yaitu:

- a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi, dengan Aktivitas Sub Keegiatannya:
- Pengawasan dan pengendalian industri

e. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

1) Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.

- 2) Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- 3) Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD

Formulasi dalam melakukan pengukuran Kualitas Pelaksanaan Anggaran Dinas PPKUKM sesuai dengan kriteria kondisinya dimana serapan anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%) \\ \text{Realisasi} &= (40\%) + ((5,26\% \times 10\%) / 20\%) + (50\%) \\ &= 92,63\% \end{aligned}$$

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja tersebut, adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program tersebut yang digunakan oleh Dinas, Sudin dan UPT di lingkungan Dinas PPKUKM. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja baik Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi yaitu:
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan dengan Aktivitas Sub Keegiatannya:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Aktivitas Sub Keegiatannya:
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus, dsb
 - c) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Aktivitas Sub Keegiatannya:
 - Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO khusus
 - Pemeliharaan Alat Laboratorium dan Perkakas Kerja Laboratorium
 - Kalibrasi Alat Laboratorium
 - Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor

- Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor, dsb.
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f) Peningkatan Pelayanan BLUD
 - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Program tersebut adalah program dari Diskominfo. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKUKM adalah Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, dengan Aktivitas Sub Keegiatannya adalah Pengelolaan Sistem Informasi Dinas PPKUKM
- f. Capaian Indikator Kinerja yang bersumber dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM memiliki 10 (sepuluh) Kegiatan Strategis Daerah, dimana semua Rencana Aksi dari Kegiatan Strategis Daerah tersebut terealisasi 100% kecuali:
- 1) KSD 20 yaitu Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang terealisasi sebesar 99,74%. Karena ada 2 (dua) Rencana Aksi yang tidak dapat terlaksana di triwulan II dan III yaitu Rencana Aksi Pemasaran Produk dan Rencana Aksi Penyediaan Ruang Usaha.
- g. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Khusus.
- Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Khusus ada 3 (tiga) indikator yang capaiannya di atas 100% yaitu:
- 1) Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021, yang mendapat nilai 95,31 (AA) dari target 91(A) dengan capaiannya sebesar 104,74%
 - 2) Nilai PMPRB, yang mendapat nilai 98,81 dari target nilai 92 dengan capaiannya sebesar 104,01%
 - 3) Jumlah kolaborator Jakarta, yang teralisasi 85 kolaborator dari target 50 kolaborator dengan capaian sebesar 170%
- h. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Operasional.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM selalu menindaklanjuti setiap arahan dari Gubernur, pengaduan masyarakat yang masuk ke dalam sistem CRM dan juga temuan hasil pemeriksaan BPK. Namun ada satu Indikator yaitu Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yang hanya mencapai 99,86%, hal ini dikarenakan kesalahan dalam pemilihan kategori waktu penyelesaian masalah yaitu lebih cepat dari seharusnya, sehingga penyelesaian pengaduan masyarakat melebihi batas waktu penyelesaian.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Khusus atau pun Operasional, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM telah melakukan kegiatan baik yang dibiayai APBD maupun kegiatan yang berkolaborasi dengan stake holder seperti, Perguruan Tinggi, Market online, Perusahaan Swasta maupun BUMN/BUMD ataupun Lembaga Negara lainnya. Beberapa Kegiatan yang telah dilakukan di Tahun 2022 untuk mencapai Indikator Kinerja Sasaran yang juga merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu:

- 1) Kolaborasi dengan aplikator dalam hal pelatihan, pemasaran melalui e-Commerce, literasi keuangan dan permodalan.
- 2) Pelaksanaan Gebetan UMKM untuk seluruh ASN Dinas PPKUKM.
Program Gebetan UMKM adalah program pembelian produk UKM/IKM Binaan Jakpreneur oleh ASN Dinas PPKUKM yang bekerjasama dengan Koperasi Pegawai.
- 3) Pelaksanaan Bazaar online UMKM.

Pada masa pandemi ini, Bazar online UMKM merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu meningkatkan omset UMKM yang terkendala dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Rincian pelaksanaan Bazar online melalui website yang diakomodir oleh 5 (lima) Sudin PPKUKM wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	BORJU Jakarta Utara	POS JP Jakarta Pusat	JAMUR BETAWI Jakarta Timur	JAKPRENEUR BARAT FESTIVAL Jakarta Barat	BLANJA JAKSEL Jakarta Selatan
Total UMKM Jakpreneur Yang Mengikuti Bazar Online	2020 : 1.271 UMKM 2021 : 1.461 UMKM 2022 : 973 UMKM	2021 : 383 UMKM	2021 : 739 UMKM 2022 : 1790 UMKM	2020 : 297 UMKM 2021 : 220 UMKM	2020 : 1200 UMKM 2021 : 2544 UMKM 2022 : 1605 UMKM
Total Omzet UMKM Yang Mengikuti Bazar Online	2020 : Rp105.890.050 2021 : Rp187.783.715 2022 : Rp116.034.850	2021 : Rp.48.203.000	2021 : Rp.5.980.000 2022 : Rp.2.086.000	2020 : Rp.31.105.000 2021 : Rp.248.883.570	2020 : Rp. 6.419.000 2021 : Rp. 7.635.000 2022 : Rp. 8.866.000
Total Produk UMKM yang dijual pada Bazar Online	2020 : 3885 Produk 2021 : 7573 Produk 2022 : 3981 Produk	2021 : 676 Produk	2021 : 900 Produk 2022 : 3952 Produk	2020 : 297 Produk 2021 : 464 Produk	2020 : 1253 Produk 2021 : 2607 Produk 2022 : 1605 Produk
Frekuensi Pelaksanaan Bazar Online	2020 : 10 Kali 2021 : 20 Kali 2022 : 9 Kali	2021 : bazaar online 2 kali dan katalog online	2021 : 8 Kali 2022 : 19 Kali	2020 : 1 Kali 2021 : 2 Kali	2020 : 4 Kali 2021 : 8 Kali 2022 : 8 Kali

4) Pelaksanaan Bazaar APBD UMKM

Pada tahun 2022 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta telah melakukan bazar di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan jumlah event bazar mencapai 472 event, jumlah peserta sebanyak 14.490 peserta dan jumlah omset mencapai Rp 11.132.333.184, dengan rinciannya sebagai berikut:

WILAYAH	REALISASI		
	JUMLAH EVENT	JUMLAH PESERTA	JUMLAH OMSET
JAKARTA PUSAT	86	2640	1,768,950,209
JAKARTA UTARA	71	2040	1,704,021,215
JAKARTA BARAT	86	2640	1,661,482,693
JAKARTA SELATAN	106	3240	2,027,596,042
JAKARTA TIMUR	106	3360	3,721,706,600
KEPULAUAN SERIBU	17	570	248,576,425
TOTAL	472	14490	11,132,333,184

5) Pelaksanaan Bazaar Kolaborasi UMKM

Pada tahun 2022 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan BUMD dan Stakeholder swasta. Jumlah event bazar yang dilaksanakan mencapai 68 event dengan jumlah peserta sebanyak 3230 peserta dan jumlah omset mencapai Rp 1.854.062.650, dengan rinciannya sebagai berikut:

WILAYAH	REALISASI		
	JUMLAH EVENT	JUMLAH PESERTA	JUMLAH OMSET
JAKARTA PUSAT	4	89	85,027,000
JAKARTA UTARA	12	1588	576,219,058
JAKARTA BARAT	4	387	230,334,716
JAKARTA SELATAN	1	30	17,747,476
JAKARTA TIMUR	41	963	876,374,850
KEPULAUAN SERIBU	6	173	68,359,550
TOTAL	68	3230	1,854,062,650

6) Pelaksanaan Jumat Beli Lokal.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM memfasilitasi UMKM untuk melaksanakan pemasaran online lewat program Jumat Beli Lokal melalui platform Tokopedia. Selama tahun 2022, telah dilaksanakan dengan jumlah UKM/IKM sebanyak 2.208 peserta dan omset yang dihasilkan sebanyak Rp 1.997.472.367

7) Pelaksanaan Jakpreneur Goes To Mall.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan 7 (tujuh) Pusat perbelanjaan untuk melaksanakan *Jakpreneur Goes to Mall*. Jumlah UKM/IKM yang berpartisipasi dalam kegiatan *Jakpreneur Goes to Mall* sebanyak 279 UKM/IKM, dengan omset mencapai Rp. 1.937.024.577.

B. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PPKUKM Tahun 2018 – 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM di Tahun 2018 – 2020 merupakan Indikator dari Kinerja Program yang terdiri dari 12 IKU. Selanjutnya di Tahun 2021, IKU Dinas PPKUKM mengalami perubahan, dimana IKU tersebut merupakan bagian dari Indikator Sasaran, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PPKUKM menjadi 2 IKU. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PPKUKM dibandingkan dengan Targetnya yang terdapat di dalam Renstra adalah sebagai berikut:

No	IKU	Satuan	Target					Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah wirausaha industri baru	Wirausaha	-	-	5.560	-	-	-	-	26.297	-	-
2	Persentase jumlah IKM yang berkualitas	Persen	-	-	12,66	-	-	-	-	18,39	-	-
3	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif	Persen	-	-	43,7	-	-	-	-	48,5	-	-
4	Persentase produk industri dengan standar SNI	Persen	-	-	76	-	-	-	-	90,77	-	-
5	Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	Persen	-	-	42,52	-	-	-	-	28,91	-	-
6	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	Koperasi	-	120	120	-	-	-	128	125	-	-

No	IKU	Satuan	Target					Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
7	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	UMKM	10.000	27.799	27.799	-	-	17.534	29.717	59.449	-	-
8	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia)	Pasar	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-
9	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrollogian yang diawasi	Pasar	-	18	20	-	-	-	18	20	-	-
10	persentase keluhan/te muan konsumen yang ditindaklanj uti	Persen	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
11	Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan , dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	Persen	96	97	98	-	-	314,56	190,19	82,15	-	-
12	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	USD	4.084.357.380	4.125.200.954	4.166.452.963	-	-	8.103.915.444,69	5.963.633.980,61	8.775.826.509,30	-	-
13	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	Rupiah	-	-	-	244.401.000.000	426.393.000.000	-	-	-	1.626.555.796.924	3.680.282.663.323
14	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	-	-	-	91%	91%	-	-	-	91,56%	92,63%

Untuk Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas PPKUKM Tahun 2022 baik IKU Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta maupun IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, keduanya mencapai target dan mengalami

peningkatan dibandingkan Tahun 2021. Peningkatan Jumlah Omset tersebut didorong dengan adanya Fasilitas pemasaran bagi UMKM baik melalui Bazaar APBD, Bazaar Online maupun Jakpreneur Goes To Mall, Jumat Belanja Lokal maupun Gebetan UMKM.

C. Realisasi Indikator Kinerja Program Dinas PPKUKM Tahun 2018 – 2022

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Realisasi					% Capaian 2022
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	USD	4.084.357.380	4.125.200.954	4.166.452.963	4.208.117.493	4.250.200.064	8.103.915.444,69	5.963.633.980,61	8.775.826.509,30	38.966.277.235,81	7.335.159.641,53	172,58%
2	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia) (Indikator 2018)	Pasar	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrollogian yang diawasi	Pasar	-	18	20	22	24	-	18	20	22	28	116,67%
	persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%
	Persentase Cakupan alat UTPP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	%	96	97	98	99	100	314,56	190,19	82,15	78,38	88,4	88,40%
3	Jumlah pasar yang menggunakan alat kemetrollogian yang diawasi	Pasar	-	18	20	22	24	-	18	20	22	24	100,00%
4	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri	Orang	-	-	-	75	75	-	-	-	626	259	345,33%

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Realisasi					% Capaian 2022
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
5	Jumlah Volume Usaha Koperasi (Indikator 2018)	Rupiah	4.986.712.500.000	-	-	-	-	14.825.107.746.377	-	-	-	-	-
6	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	Koperasi	-	120	120	120	120	-	128	125	126	120	100,00%
7	Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	-	-	-	70	70	-	-	-	502	432	617,14%
8	Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis	Orang	-	-	-	70	70	-	-	-	4.800	467	667,14%
9	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	UMKM	10.000	27.799	27.799	27.799	27.797	17.534	29.717	59.449	46.903	27.936	100,50%
10	Jumlah wirausaha industri baru	Wirausaha	2000	5.560	5.560	5.560	5.560	1.766	18.425	26.297	23.762	6.984	125,61%
	Persentase jumlah IKM yang berkualitas	%	7,04	9,85	12,66	15,47	18,28	7,04	9,85	18,39	22,58	77,76	425,38%
	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif	%	14,6	29,1	43,7	58,3	72,8	14,6	54	48,5	175,97	333,74	458,43%
	Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	%	15,03	28,77	42,52	56,26	70	15,11	28,77	28,91	33,85	70,03	100,04%
11	Persentase produk industri dengan standar SNI	%	72	74	76	78	80	88,51	74	90,77	87,37	93,1	116,38%
12	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,00%
	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	100,00%

Analisis hasil (outcome) dari pencapaian Indikator Kinerja Program pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan pelayanan dalam penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) sejumlah 32.799 SKA untuk mendukung UKM dalam melakukan ekspor. Ekspor di Tahun 2022 berdasarkan SKA telah mencapai USD 7.335.159.641,53
- 2) Telah dilaksanakan pengawasan terhadap PKL dan pelaku usaha atas produk SNI, barang beredar, produk makanan dan minuman serta pengawasan terhadap alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) baik di pasar tradisional maupun modern sebanyak 28 pasar.
- 3) Adanya tindak lanjut terhadap setiap keluhan konsumen yang masuk melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan capaian sebesar 100%. Dimana setiap keluhan yang masuk diselesaikan melalui tiga cara yang dapat dipilih oleh konsumen yaitu Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase.
- 4) Telah dilaksanakan kegiatan pelayanan kemetrologian dan Sidang Tera Pasar sehingga cakupan UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang terealisasi sebesar 88,4%. Tidak maksimalnya pelayanan kemetrologian tera dan tera ulang (Cakupan UTTP) dikarenakan banyaknya pabrik-pabrik yang pindah keluar Provinsi DKI sehingga obyek UTTP untuk pelaksanaan Tera dan Tera ulang berkurang.
- 5) Telah dilaksanakan kegiatan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi untuk memfasilitasi Koperasi dalam berbadan hukum serta adanya pendampingan terhadap Koperasi dalam pengajuan sertifikat NIK, yang menghasilkan 120 Koperasi bersertifikat NIK di Tahun 2022.
- 6) Selama 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategis Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta yaitu dari Tahun 2018 – 2022, dapat terlihat peningkatan realisasi Indikator Kinerja Program walaupun masih ada 2 (dua) Indikator Kinerja Program yang tidak mencapai target yaitu:
 - Indikator Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang yang tidak tercapai targetnya di Tahun 2020, 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan adanya pandemic covid sehingga terjadi rasionalisasi anggaran dan pembatasan pergerakan (PPKM) serta banyaknya pabrik-pabrik yang pindah keluar Provinsi DKI sehingga obyek UTTP untuk pelaksanaan Tera dan Tera ulang berkurang.
 - Indikator Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya yang tidak tercapai targetnya di Tahun 2020 dan 2021. Hal ini dikarenakan adanya pandemic covid yang mengakibatkan rasionalisasi anggaran untuk pembelian test kit sebagai alat uji yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk IKM

bebas bahan berbahaya

D. Realisasi Indikator Sasaran Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan yang merupakan target Dinas PPKUKM dalam RPJMD dari tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:

DINAS PPKUKM	Kondisi Awal	Tahun					Target 2018 - 2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
Target	63.680	12.000	33.359	33.359	33.359	33.357	145.434
Realisasi		19.543	48.142	85.746	70.665	34.920	259.016

Dinas PPKUKM telah mencapai target baik tiap tahunnya maupun secara keseluruhan dengan realisasi Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan di Tahun terakhir yaitu Tahun 2022 sebesar 259.016 wirausaha/calon wirausaha baru yang terdaftar di system Jakpreneur.

3. PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi DKI Jakarta dan 3 (tiga) Provinsi lainnya pada Tahun 2020 dan 2021 dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Lapangan Usaha	2020	2021
	Tahunan (Miliar Rupiah)	Tahunan (Miliar Rupiah)
PROVINSI DKI JAKARTA		
Industri Pengolahan	315,182.49	357,912.04
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	460,402.06	491,033.31
PROVINSI JAWA BARAT		
Industri Pengolahan	857,004.32	923,786.04
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	303,862.68	319,585.97
PROVINSI JAWA TENGAH		
Industri Pengolahan	464,609.13	487,445.10
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	181,860.78	195,399.04
PROVINSI JAWA TIMUR		
Industri Pengolahan	705,506.40	753,935.89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	412,091.36	453,027.58

(Sumber: BPS update 2 Sept 2022, Data Tahun 2022 belum ada)

Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian dan Perdagangan secara Nasional pada Tahun 2022 belum dirilis oleh BPS. Pada Tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi ke 4 (empat) Nasional untuk Kontribusi PDRB ADHB dari sector Industri Pengolahan yaitu sebesar 357.219,04 (Miliar Rupiah) dan berada pada posisi pertama Nasional untuk Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Pengolahan yaitu sebesar 491.033,31 (Miliar Rupiah)

4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2022 pada tabel dibawah.

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	171.62%	93.16%	6.84%	193.41%	94.56%	5.44%
2	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	665.53%	95.95%	4.05%	863.12%	91.60%	8.40%
3	Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta	196.62%	98.81%	1.19%	216.66%	93.40%	6.60%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100.62%	97.05%	2.95%	101.79%	96.57%	3.43%

Dalam hal serapan anggaran, setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM mencapai di atas 91% dengan tingkat efisiensi sekitar 3 s,d 8 % dan untuk capaian kinerjanya di atas 100% seperti yang terlihat pada tabel di atas

**Program dan Anggaran yang mendukung Sasaran Strategis Dinas PPKUKM
Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	pagu	realisasi	capaian
			satuan	target	Realisasi					
1	Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	rupiah	212.009.400.000.000	363.850.000.000.000	171,62%	Program Pengembangan Ekspor	4.645.575.028	3.987.269.493	85,83%
							Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	6.519.007.644	6.319.488.106	96,94%
							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	-
							Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	149.760.000	144.975.000	96,80%
							Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.580.999.221	1.552.391.083	98,19%
							Program Pengembangan UMKM	137.087.000	136.745.000	99,75%
2	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	rupiah	244.401.000.000	1.626.555.796.924	665,53%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	27.029.289.259	25.933.680.955	95,95%
3	Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta	rupiah	134.471.200.000.000	264.400.000.000.000	196,62%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	21.764.275.270	21.504.822.458	98,81%
							Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-	-	-
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91%	91,56%	100,62%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	21.249.891.880	20.704.329.084	97,43%
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	155.023.518.235	150.370.557.121	97,00%
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	324.800.000	319.200.000	98,28%

**Program dan Anggaran yang mendukung Sasaran Strategis Dinas PPKUKM
Tahun 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian %	Program	APBDP	realisasi	capaian
			satuan	target	Realisasi					
1	Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	rupiah	212,009,400,000,000	410,050,000,000,000	193.41%	Program Pengembangan Ekspor	26,102,102,222	24,691,248,640	94.59%
							Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	7,218,751,321	7,028,969,855	97.37%
							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	9,523,854,265	8,827,458,255	92.69%
							Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	241,760,000	199,540,000	82.54%
							Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1,275,150,147	1,195,823,994	93.78%
							Program Pengembangan UMKM	322,580,740	311,271,500	96.49%
2	Meningkatnya kewirausahaan yang berdayasaing	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	rupiah	426,393,000,000	3,680,282,663,323	863.12%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	39,121,658,397	35,836,599,948	91.60%
3	Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta	rupiah	134,471,200,000,000	291,350,000,000,000	216.66%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	94,152,919,724	87,937,653,889	93.40%
							Program Pengendalian Izin Usaha Industri	56,620,000	55,515,000	98.05%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91%	92.63%	101.79%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	191,887,892,953	185,286,002,407	96.56%
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	489,665,152	489,477,153	99.96%

Pada tahun 2022, Sasaran Strategis Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta didukung dengan 11 (sebelas) Program yang beranggaran, lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya didukung oleh 10 (sepuluh) Program. Untuk capaian realisasi anggaran per program di tahun 2022 paling rendah sebesar 82,54% dari Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Serapan anggaran Program tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. Capaian realisasi anggaran Program yang paling tinggi sebesar 99,96% dari Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

3.2. REALISASI ANGGARAN

1. REALISASI ANGGARAN PER SKPD/UKPD DINAS PPKUKM TAHUN 2022

NO	SKPD/UKPD	APBD 2022	APBD PERUBAHAN 2022	REALISASI S.D 31 Desember 2022	PERSENTASE REALISASI TERHADAP APBDP
1	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	203,135,010,832	156,640,507,508	152,108,499,164	97.11%
2	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	44,862,543,790	34,938,912,343	32,448,427,446	92.87%
3	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	23,651,418,834	23,048,088,928	22,053,592,476	95.69%
4	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	30,486,224,772	29,727,249,437	27,846,675,793	93.67%
5	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	35,863,145,174	34,996,666,824	32,238,962,374	92.12%
6	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	37,793,809,313	37,576,282,610	35,659,932,869	94.90%

NO	SKPD/UKPD	APBD 2022	APBD PERUBAHAN 2022	REALISASI S.D 31 Desember 2022	PERSENTASE REALISASI TERHADAP APBDP
7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	6,425,277,342	5,673,560,257	5,205,186,313	91.74%
8	PUSAT DIKLAT PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	4,537,611,249	4,535,638,372	4,163,836,194	91.80%
9	UNIT PENGELOLA METROLOGI	23,744,192,621	7,548,086,189	7,303,474,298	96.76%
10	UPK PPUKMP PULOGADUNG	11,005,137,863	11,312,029,247	9,495,522,990	83.94%
11	UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK	9,722,999,826	9,079,695,991	8,702,396,646	95.84%
12	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	14,011,463,569	14,393,310,161	13,712,127,315	95.27%
13	PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,018,414,054	922,927,054	920,926,763	99.78%
TOTAL		446,257,249,239	370,392,954,921	351,859,560,641	95.00%

2. REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2022

No	Program	APBD	APBDP	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Ekspor	29,499,279,131	26,102,102,222	24,691,248,640	94.59%
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	6,913,997,458	7,218,751,321	7,028,969,855	97.37%
3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	8,584,064,979	9,523,854,265	8,827,458,255	92.69%

No	Program	APBD	APBDP	Realisasi	Capaian
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	241,760,000	241,760,000	199,540,000	82.54%
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1,288,356,147	1,275,150,147	1,195,823,994	93.78%
6	Program Pengembangan UMKM	337,764,740	322,580,740	311,271,500	96.49%
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	57,166,548,623	39,121,658,397	35,836,599,948	91.60%
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	97,236,662,283	94,152,919,724	87,937,653,889	93.40%
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	56,620,000	56,620,000	55,515,000	98.05%
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	244,347,165,526	191,887,892,953	185,286,002,407	96.56%
12	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	585,030,352	489,665,152	489,477,153	99.96%
	Total	446,257,249,239	370,392,954,921	351,859,560,641	95.00%

Penyerapan anggaran anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM beserta Sudin dan UPT di Tahun 2022 sebesar 95.00% lebih rendah dibandingkan Tahun 2021. Namun, penyerapan anggaran tersebut sudah optimal sesuai dengan kebutuhan selain disebabkan adanya efisiensi. Adapun Aktivitas Sub Kegiatan yang terealisasi di bawah 60% yaitu :

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM
 - a. Aktivitas Sub Kegiatan Pengawasan Produk SNI Wajib dengan nilai anggaran di APBDP 2022 sebesar Rp 118.111.536 hanya terealisasi sebesar Rp 65.340.400 atau sebesar 55,32%. Hal ini karena sudah terealisasi sesuai kebutuhan.
- 2) Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Administrasi Jakarta Utara
 - a. Aktivitas Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan nilai anggaran di APBDP 2022 sebesar Rp 2.035.000 hanya terserap

sebesar Rp 1.000.000 atau sebesar 49,14%. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan telah sesuai dengan kebutuhan.

- b. Aktivitas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2022 sebesar Rp 3.842.000 hanya terserap sebesar Rp 1.294.000 atau sebesar 33,68%. Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus telah sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Aktivitas Sub Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai dengan nilai anggaran di APBDP 2022 sebesar Rp. 31.379.853 hanya terserap sebesar Rp 17.665.600 atau sebesar 56, 30% sesuai dengan kebutuhan
 - b. Aktivitas Sub Kegiatan Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2022 sebesar Rp. 6.834.400 hanya terserap sebesar Rp 2.150.600 atau sebesar 31,47% sesuai dengan kebutuhan
 - 4) Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - a. Aktivitas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan KDO dengan nilai anggaran di APBDP 2022 sebesar Rp. 363.000 hanya terserap sebesar Rp 180.000 atau sebesar 49,59%. Penyerapan sesuai dengan kebutuhan
 - 5) Unit Pengelola Penilaian Kesuaian Bahan dan Barang Teknik
 - a. Aktivitas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus dengan nilai anggaran di APBDP 2022 sebesar Rp. 4.388.300 hanya terserap sebesar Rp 2.604.300 atau sebesar 59,35%. Pembayaran STNK dan pajak tersebut telah sesuai dengan jumlah pajak STNK KDO nya
 - b. Aktivitas Sub Kegiatan Penanganan Limbah Laboratorium dengan nilai anggaran di APBDP 2022 sebesar Rp. 52.389.780 hanya terserap sebesar Rp 26.011.500 atau sebesar 49,65%. Penyerapan ini sesuai dengan volume limbah.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Segala upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertujuan untuk mencapai sebuah visi yakni “Jakarta kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”. Dalam mencapai visi tersebut, pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah merencanakan dan melaksanakan 11 (sebelas) program di APBDP 2022 yang meliputi:

1. Program Program Pengembangan Ekspor
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
11. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Beberapa Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta adalah:

- 1) Tercapainya Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan, sebanyak 34.920 wirausaha dari target 33.357, yang terdiri dari 6.984 IKM dan 27.936 UKM
- 2) Tercapainya Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta sebesar Rp. 410.050.000.000.000 dari target Rp. 212.009.400.000.000.
- 3) Tercapainya Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp. 3.680.282.663.323 dari target Rp. 426.393.000.000

- 4) Tercapaiannya Kontribusi transaksi perekonomian sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 291.350.000.000.000 dari target Rp. 134.471.200.000.000.
- 5) Tercapaiannya Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 92,63% dari target sebesar 91%
- 6) Tercapainya pelaksanaan Rencana Aksi dari Kegiatan Strategis Daerah, dimana 9 (Sembilan) KSD dapat selesai 100% dan 1 (satu) KSD lainnya selesai 99,74%.
- 7) Tercapainya setiap Indikator Sasaran Khusus dan Indikator Sasaran Operasional sebesar 100% kecuali Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat hanya 99,86%, Hal ini dikarenakan kesalahan administrasi pemilihan kategori permasalahan yang mengakibatkan salahnya jangka waktu penyelesaian masalah.
- 8) Tercapaiannya nilai ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta berdasarkan pelayanan SKA sebesar USD 7.335.159.641,53 dari target USD 4.250.200.064
- 9) Tercapainya pengawasan terhadap PKL dan pelaku usaha atas produk SNI, barang beredar, produk makanan dan minuman serta pengawasan terhadap alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) baik di pasar tradisional maupun modern sebanyak 28 pasar dari target 24 pasar.
- 10) Tercapainya persentase keluhan/ temuan konsumen yang ditindaklanjuti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebesar 100% dari target 100%.
- 11) Tercapainya Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri sebanyak 259 orang dari target 75 orang.
- 12) Tercapainya jumlah Koperasi yang mendapatkan sertifikat NIK sebanyak 120 Koperasi dari target 120 Koperasi.
- 13) Tercapainya Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis sebanyak 467 orang dari target 70 orang.
- 14) Tercapainya persentase jumlah IKM yang berkualitas dengan nilai realisasi sebesar 77,76% dari target 18,28%
- 15) Tercapainya Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif dengan nilai realisasi sebesar 333,74% dari target 72,8%
- 16) Tercapainya Persentase produk industri dengan standar SNI dengan nilai realisasi sebesar 93,1% dari target 80%
- 17) Tercapainya Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dan Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional yang mencapai skala nilai 4 berdasarkan hasil survei

Permasalahan

Pada tahun 2022 secara umum semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik, beberapa permasalahan yang menyebabkan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tidak tercapai maksimal adalah:

- 1) Indikator Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang tidak tercapai targetnya di Tahun 2020, 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan adanya pandemic covid sehingga terjadi rasionalisasi anggaran dan pembatasan pergerakan (PPKM) serta banyaknya pabrik pabrik yang pindah keluar Provinsi DKI sehingga obyek UTTP untuk pelaksanaan Tera dan Tera ulang berkurang.
- 2) Indikator Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya tidak tercapai targetnya di Tahun 2020 dan 2021. Hal ini dikarenakan adanya pandemic covid yang mengakibatkan rasionalisasi anggaran untuk pembelian test kit sebagai alat uji yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk IKM bebas bahan berbahaya

Saran

Dalam mengatasi beberapa permasalahan di atas, beberapa saran sebagai usulan langkah perbaikan, antara lain:

- 1) Perlu dirumuskan ulang formulasi pengukuran Persentase Cakupan alat UTTP agar tidak berdasarkan jumlah UTTP yang ada tetapi berdasarkan permohonan tera/tera ulang UTTP yang masuk
- 2) Pelaksanaan kolaborasi dengan stakeholder seperti perguruan tinggi, marketplace, lembaga, perusahaan, maupun perorangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Diharapkan untuk ke depannya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dapat memperbaiki kinerjanya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mencapai indikator kinerjanya baik Indikator Kinerja Sasaran maupun Indikator Kinerja Program .